

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Campo & Sundaram, *To Serve and To Preserve : Improving Public Administration in a Competitive World*, Asian Development Bank, 2001.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.
- Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Bandung, 2010.
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rondinelli dan Cheema, *Administrative Decentralization Perspective : Policy Implementation in Developing Countries*, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005.

B. Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan PPNS.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

C. Sumber Lainnya

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Tim Kajian Monitoring dan Evaluasi PPNS PT.Kuarsa Heksagon.

<http://ppid.bandung.go.id/informasi/struktur-organisasi-pemerintah-kota-bandung/>

<http://dprd-bandungkota.go.id/berita/berita-umum/1227-dewan-setuju-raperda-ppns-jadi-peraturan-daerah.html>

<https://antpcom.wordpress.com/2010/04/09/peraturan-daerah-kota-bandung-nomor-7-tahun-2009/>